

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
ANGGARAN BELANJA MODAL**

Nida Azizah

Universitas Al Azhar Indonesia

Syumita

Universitas Al Azhar Indonesia

This research is meant to test the influence of Local Own Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund of the Capital Expenditure. The population in this study are districts and municipalities in Indonesia which consists of 410 districts and 92 cities in Indonesia in 2016. The technique of sampling in this research is the simple random sampling, which is the type of the sampel was choose randomly. This study uses secondary data which has been obtained from The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) in 2016 periods. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression t test, F test, and the coefficient of determination. The results showed that General Allocation Funds haven't significant effect on of Capital Expenditure. Local own source revenue, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund significant effect on Capital Expenditure. For local governments are expected to pay more attention to the proportion of General Allocation Fund to capital expenditure.

Key word : Local own source revenue, general allocation fund, special allocation fund, revenue sharing fund, capital expenditure

1. Pendahuluan

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menetapkan, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (Heliyanto dan Handayani, 2016).

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Sularno, 2013).

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang secara langsung meningkatkan kemajuan dan kemandirian daerah.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003). Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan

efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mentransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah menggunakan dana transfer secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah yang disertai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal (Nuarisa, 2013).

Penelitian ini menggunakan periode tahun 2016 yang terdapat pada laporan realisasi anggaran seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia, karena dengan menelitiseluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini.

2. Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pendapatan Asli Daerah dan anggaran Belanja Modal

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Tujuan daripada PAD yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi Daerah masing-masing (Sughiarti dan Supadmi, 2014).

Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Nuarisa, 2013). Berdasarkan penelitian diatas yang didukung oleh peneliti Darwanto dan Yuli Yustikasari (2007) memberikan hasil yang mengarah signifikan dan positif maka dirumuskan hipotesis :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.

2.2. Dana Alokasi Umum dan anggaran Belanja Modal

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Wandira, 2013).

Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan (Heliyanto dan Handayani, 2016).

Heliyanto dan Handayani (2016) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap

Belanja Modal pada seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 kota berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.

2.3. Dana Alokasi Khusus dan anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Wandira,2013).

Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013).

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah daerah. Maka alokasi belanja juga akan semakin meningkat. Hipotesis yang dirumuskan :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap anggaran Belanja Modal.

2.4. Dana Bagi Hasil dan anggaran Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Heliyanto dan Hadiyanti, 2016).

Arbie Gugus Wandira (2013) menyatakan Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian diatas maka perumusan hipotesisnya adalah :

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Indoneisa 410 kabupaten dan 92 kota. Penulis memperoleh data mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan anggaran Belanja Modal Kabupaten dan kota di Indoneisa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk periode tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik data secara *Simple Random Sampling* dengan jumlah 229 sampel.

3.2. Operasional Variabel

1) Variabel Dependen

Anggaran Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal merupakan belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia tahun 2016. Indikator variabel belanja modal antara lain : Belanja Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Pengukuran variabel Anggaran Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan :

Belanja Modal : Belanja Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Modal Fisik Lainnya.

2) Variabel Independen

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Wandira,2013). Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus :
$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan

dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. (Nuarisa, 2013). Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Tuasikal, 2008). Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing pemerintah Kabupaten dan Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi. Variabel Dana Alokasi Khusus diukur dengan rumus:

$$\text{DAK} : \text{Fisik} + \text{Non Fisik}$$

d) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Wahyuni & Adi 2009). Indikator DBH adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dapat diukur dengan rumus :

$$\text{DBH} : \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$$

3.3. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisa data yang mengolah atau menganalisis data yang berbentuk angka atau bilangan dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, penelitian ini menggunakan persamaan regresi seperti berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e_i$$

Keterangan :

- Y : variabel dependen (*belanja modal*)
a : koefisien konstanta
b₁ : koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah
X₁ : variabel independen (PAD)
b₂ : koefisien regresi Dana Alokasi Umum
X₂ : variabel independen (DAU)
b₃ : koefisien regresi Dana Alokasi Khusus
X₃ : variabel independen (DAK)
b₄ : koefisien regresi Dana Bagi Hasil
X₄ : variabel independen (DBH)
e_i : kesalahan prediksi (error)

3.4. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan anggaran Belanja Modal.

3.5. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui dan menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Tujuan uji asumsi klasik adalah agar dapat menghasilkan nilai parameter yang baik sehingga hasil penelitian dapat lebih diandalkan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4. Analisis Data dan Pembahasan

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PAD | 229 | 260000000,00 | 3195340365380,00 | 198295991480,0961 | 379796772398,36835 |
| DAU | 229 | 254752550000,00 | 1917780234000,00 | 660301383080,7554 | 271288758817,31082 |
| DAK | 229 | 25903052000,00 | 692451639000,00 | 261269056335,9869 | 127567244161,07800 |
| DBH | 229 | 3466210000,00 | 7419491731000,00 | 142804102679,8297 | 524336332252,30426 |
| BM | 229 | 99345158538,00 | 1801156231000,00 | 413430527883,9301 | 249848301314,88620 |
| Valid N (listwise) | 229 | | | | |

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

Hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (X1) Kabupaten dan Kota di Indonesia sebanyak Rp. 198.295.991.480 dengan Standar devisiiasi Rp. 379.796.772.398 dari rata-rata. Jumlah PAD terendah sebesar Rp. 2.600.000.000 dan PAD tertinggi Rp. 3.195.340.365.380

Rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum (X2) sebanyak Rp. 660.301.383.080 dengan Standar devisiiasi Rp. 271.288.758.817 dari rata-rata. Jumlah DAU terendah sebesar Rp. 254.752.550.000 dan jumlah DAU tertinggi Rp. 1.917.780.234.000.

Rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus (X3) sebanyak Rp. 261.269.056.335 dengan Standar devisiiasi Rp. 127.567.244.161 dari rata-rata. Jumlah DAK terendah Rp. 25.903.052.000 dan jumlah DAK tertinggi Rp.692.451.639.000.

Rata-rata jumlah Dana Bagi Hasil (X4) sebanyak Rp. 142.804.102.679 dengan Standar devisiiasi Rp. 524.336.332.252 dari rata-rata. Jumlah DBH terendah Rp. 3.466.210.000 dan jumlah DBH tertinggi Rp. 7.419.491.731.000.

Rata-rata jumlah Belanja Modal (Y) Kabupaten dan Kota di Indonesia sebanyak Rp. 412.407.253.625 dengan Standar devisiiasi Rp. 251.061.951.060 dari rata-rata. Jumlah Belanja Modal terendah Rp. 993.451.585.380 dan Belanja Modal tertinggi Rp. 1.801.156.231.000.

4.2. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui normalitas setiap variabel penelitian nilai signifikan lebih dari 0.05 dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 229 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000304 |
| | Std. Deviation | 137556091613,00522 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,089 |
| | Positive | ,088 |
| | Negative | -,089 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,344 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,054 |

a. Test distribution is Normal.

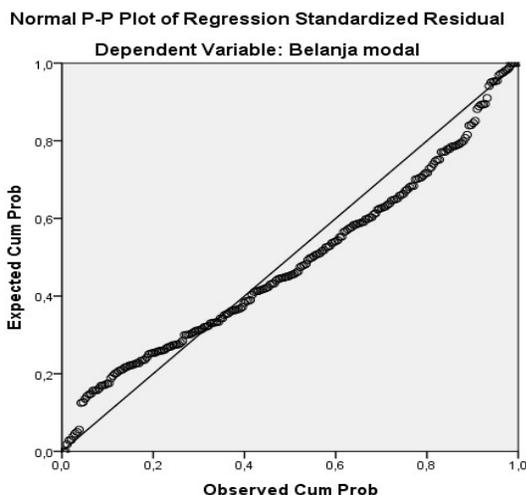
b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh variabel sebesar 0,054 lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan berdistribusi normal dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya karena telah memenuhi persyaratan normalitas.

Pengujian normalitas dalam model regresi juga menggunakan analisis grafik Normal P-P Plot yang disajikan pada Gambar 1. Grafik ini menunjukkan penyebaran data dari variabel Belanja Modal. Jika penyebaran data dalam grafik berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1. Grafik Normal P-Plots



4.3. Uji Multikolinearitas

Dasar dalam pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu jika VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih besar dari 10 dan *tolerance* kurang dari 0.1 maka H_a diterima dan model regresi memiliki gejala multikolinearitas. Sebaliknya jika VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 dan *tolerance* lebih besar dari 0.1 maka H_a ditolak dan model regresi tidak memiliki gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel 3. Sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| (Constant) | | |
| Pendapatan Asli Daerah | ,781 | 1,280 |
| 1 Dana Alokasi Umum | ,394 | 2,537 |
| Dana Alokasi Khusus | ,451 | 2,219 |
| Dana Bagi Hasil | ,812 | 1,231 |

a. Dependent Variable: Belanja modal

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

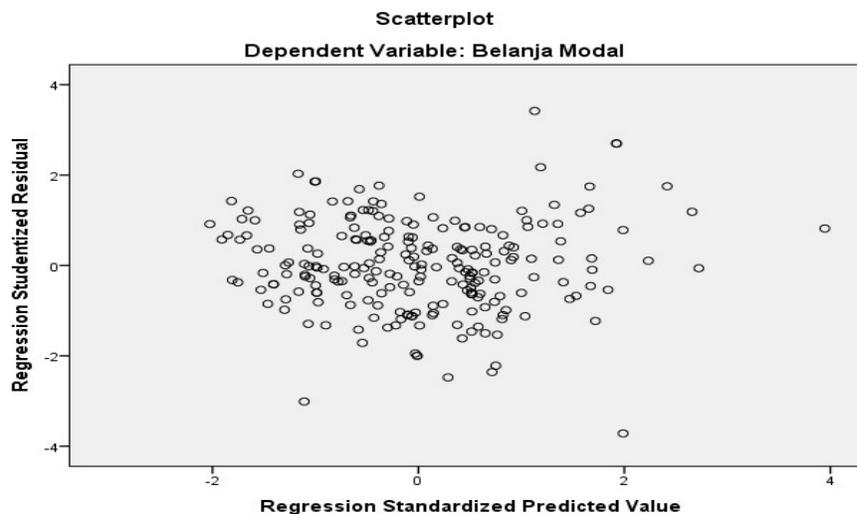
Dari hasil pengujian yang tersaji pada tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0,1. Selain itu juga diketahui bahwa dari masing-masing nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) pada variabel independen PAD, DAU, DAK dan DBH tidak terdapat nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) yang lebih dari 10. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

4.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar analisis yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125).

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

Dari grafik *scatterplots* tersebut di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

4.5. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 169644340866,927 | 25049796553,734 | | 6,772 | ,000 |
| 1 PAD | ,398 | ,027 | ,602 | 14,542 | ,000 |
| DAU | ,002 | ,054 | ,002 | ,036 | ,972 |
| DAK | ,566 | ,107 | ,288 | 5,278 | ,000 |
| DBH | ,102 | ,019 | ,213 | 5,246 | ,000 |

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 169644340866,927 + 0.398X_1 + 0.002X_2 + 0.566X_3 + 0.102X_4 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 169644340866,927 artinya apabila nilai variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil bernilai 0, maka diasumsikan anggaran Belanja Modal bernilai semakin berkurang.
2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai positif 0,398 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah maka diperkirakan anggaran Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,398 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum bernilai positif 0,002 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Alokasi Umum maka diperkirakan anggaran Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,002 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus bernilai positif 0,566 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Alokasi Khusus maka diperkirakan anggaran Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,566 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.
5. Koefisien regresi Dana Bagi Hasil bernilai positif 0,102 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Bagi Hasil maka diperkirakan anggaran

Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,102 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.

4.6. Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik “t”)

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 169644340866,927 | 25049796553,734 | | 6,772 | ,000 |
| ¹ PAD | ,398 | ,027 | ,602 | 14,542 | ,000 |
| DAU | ,002 | ,054 | ,002 | ,036 | ,972 |
| DAK | ,566 | ,107 | ,288 | 5,278 | ,000 |
| DBH | ,102 | ,019 | ,213 | 5,246 | ,000 |

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

Berdasarkan tabel 5 uji t menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,000 < 0,050$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 5 uji t bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,972. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi $0,972 > 0,050$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi tidak memiliki signifikansi terhadap anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 5 uji t bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,000 < 0,050$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 5 uji t bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi

tersebut signifikan karena signifikansi $0,000 < 0,050$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.

4.7. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F atau ANOVA)

Hasil uji statistik F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|-----------------|-----|-----------------|---------|-------------------|
| Regression | 100571768841315 | 4 | 251429422103289 | 130,548 | ,000 ^b |
| | 7700000000,000 | | 4000000000,000 | | |
| 1 Residual | 431414266148477 | 224 | 192595654530570 | | |
| | 6700000000,000 | | 40000000,000 | | |
| Total | 143713195456163 | 228 | | | |
| | 54000000000,000 | | | | |

a. Dependent Variable: Belanja modal

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, untuk melihat pengaruh secara serentak, dilakukan uji F yaitu pengujian secara bersama-sama pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) dengan Belanja Modal (Y). Pada pengujian ini diketahui besarnya signifikansi 0.000 kurang dari dari 0.05. yang artinya, H_0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

4.8. Uji Koefisien Determinan Berganda (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinan Berganda

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted Square | R | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-----------------|---|----------------------------|---------------|
| 1 | ,837 ^a | ,700 | ,694 | | 138778836473,92725 | 2,271 |

Koefisien determinasi ganda Adjusted R Square menunjukkan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama. Hasil analisis koefisien determinasi yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa adjusted R² adalah 0.694. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara keseluruhan terhadap anggaran Belanja modal sebesar 69,4% atau dengan kata lain 69,4% variansi nilai variabel Y (Belanja Modal) dapat diterangkan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4. Sedangkan sisanya sebesar 30,6% merupakan kontribusi atau pengaruh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

4.9. Uji Koefisien Beta

Uji koefisien beta digunakan untuk menunjukkan variabel bebas manakah yang dominan mempengaruhi Belanja Modal, dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien beta yang distandarisasi paling besar. Hasil uji koefisien beta dapat dilihat pada tabel 8. berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Beta

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 169644340866,927 | 25049796553,734 | | 6,772 | ,000 |
| PAD | ,398 | ,027 | ,602 | 14,542 | ,000 |
| ¹ DAU | ,002 | ,054 | ,002 | ,036 | ,972 |
| DAK | ,566 | ,107 | ,288 | 5,278 | ,000 |
| DBH | ,102 | ,019 | ,213 | 5,246 | ,000 |

Sumber: Data Sekunder dioleh dengan SPSS Ver 21.00 oleh penulis

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Beta yang distandarisasi sebesar 0.602 sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah lebih berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal dibandingkandengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

4.10 Pembahasan

4.10.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan UjiSignifikan Parameter Individu untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 6,772. Nilai signifikansi $< 0,000$ menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan signifikan positif terhadap anggaran Belanja Modal. Penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heliyanto dan Handayani (2016) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Heliyanto dan Handayani (2016) mengatakan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja langsung daerahnya juga semakin tinggi terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Dengan demikian semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.

4.10.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Umum diukur dengan UjiSignifikan Parameter Individu untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,972 dan nilai t hitung sebesar 6,772. Nilai signifikansi $> 0,000$ menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki hubungan signifikan negatif terhadap anggaran Belanja Modal. Penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi tidak memiliki signifikansi terhadap anggaran Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Dana Alokasi umum secara statistik tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

4.10.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Khusus Uji Signifikan Parameter Individu untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 6,772. Nilai signifikansi <0,000 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan signifikan positif terhadap anggaran Belanja Modal. Penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan variabel umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap anggaran Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten dan Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto dan Handayani (2016), yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

4.10.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Bagi Hasil Uji Signifikan Parameter Individu untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 6,772. Nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki hubungan signifikan positif terhadap anggaran Belanja Modal. Penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap anggaran Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis keempat dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka anggaran belanja modal pun meningkat.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira (2013) memberikan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini, yaitu DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH.

5 Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini hanya menggunakan data satu tahun sehingga tidak dapat di ketahui kecenderungan antar waktu. Peneliti tidak mungkin mempelajari semua tahun yang ada dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya peneliti dalam meneliti.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a) Untuk variabel PAD yang berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal Pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah lebih jauh lagi sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD.
 - b) Untuk variabel DAK dan DBH sangat signifikan terhadap anggaran belanja modal maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan anggaran DAK dan DBH yang di proporsikan ke anggaran belanja modal.
 - c) Untuk variabel DAU adanya pengaruh secara tidak signifikan terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di anggaran belanja modal.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a) Penelitian berikutnya dapat menambah periode tahun dan juga menjelaskan kebijakan anggaran belanja modal.
 - b) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi dan lebih lengkap, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau kondisi makro ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Arwati dan Hadiati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. BPK RI.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Simposium Nasional AkuntansiX* Makasar 26-28 Juli 2007.
- Haryanto, at. All. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliyanto dan Handayani. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kusnandar dan Siswanto. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)". *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.

- Sugiarthi dan Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. ALFABETA.
- Tuasikal, Askam. (2008). PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. Universitas Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- Wandira, Arbie Gugus. (2008). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.